



## Indonesia Tingkatkan Pendanaan Penanggulangan Bencana yang Adaptif

**Yogyakarta, 10 Juli 2023** – Sebagai bagian dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia menyelenggarakan seminar tentang Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana (DRFI) dan Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (ASP) di Indonesia. Seminar dibuka oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kemenkeu, Parjiono dan juga sambutan dari perwakilan tuan rumah yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wiyos Santoso. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pembaruan tentang penerapan strategi DRFI dan sinerginya dengan peta jalan ASP untuk melindungi negara, masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah, dan aset Indonesia dengan lebih baik dari bencana alam.

Bencana telah memberikan beban yang sangat besar pada anggaran Indonesia. Negara ini mengalami kerugian ekonomi sebesar US\$1,54 miliar (Rp22,8 triliun) setiap tahun akibat bencana sepanjang 2000-2016. Perubahan iklim dan dampak dari kenaikan suhu juga mengancam ekonomi kelautan Indonesia yang saat ini bernilai US\$ 256 miliar.

“Rentetan bencana alam yang terjadi dengan besarnya kerugian ekonomi, memicu Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) atau *Disaster Risk Financing and Insurance* (DRFI) di akhir tahun 2018. Strategi yang biasa disebut dengan Strategi PARB ini bertujuan meningkatkan kemampuan pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan membangun resiliensi ekonomi di tengah terjadinya berbagai bencana di Indonesia,” ujar Parjiono. Melalui strategi ini, kapasitas pendanaan penanggulangan bencana dapat ditingkatkan dengan pencarian alternatif sumber pembiayaan baru di luar APBN. Selain itu, sebagian risiko bencana juga dapat ditransfer melalui asuransi.

Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan mengembangkan instrumen terobosan Strategi PARB yang disebut *Disaster Pooling Fund* (Pooling Fund Bencana – PFB). Instrumen ini adalah *Pooling Fund* pertama di dunia dan bertujuan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pembiayaan bencana di Indonesia di masa mendatang. Dana ini juga dirancang untuk bersifat fleksibel, responsif, berkelanjutan, serta pelengkap APBN sebagai sumber pendanaan bencana.

Pemerintah Indonesia juga tengah menyelesaikan adopsi kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (ASP), yang bertujuan untuk menyatukan sektor perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim dan manajemen risiko bencana untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap bencana alam dan terkait iklim. Pengembangan ASP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan reformasi perlindungan sosial.

Dua konsep besar yang masih terus dalam proses pengembangan ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang dirujuk, serta diminta untuk berbagi pengetahuan juga pengalaman terkait pembelajaran pendanaan risiko bencana dan perlindungan sosial adaptif, baik tingkat regional maupun global. “Oleh karena itu, bersamaan dengan semangat kerja sama di ASEAN dan Ketetuaan Indonesia tahun 2023, kami bangga dapat menyelenggarakan seminar ini sebagai upaya untuk mengarusutamakan penerapan strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana dan Perlindungan Sosial Adaptif bagi audiens di kawasan,” kata Parjiono.

Senada dengan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wiyos Santoso menyampaikan bahwa bencana alam dan tantangan sosial semakin meningkat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan mengapresiasi peran penting asuransi bencana alam dan jaminan sosial dalam rangka melindungi dan membantu masyarakat. “Asuransi bencana alam menjadi penyangga yang penting dalam meminimalisasikan dampak finansial yang dihadapi oleh individual dalam bisnis. Selain itu, penting juga untuk membahas jaminan sosial sebuah sistem yang dirancang untuk melindungi dan memberikan keamanan finansial pada masyarakat dalam situasi sulit yang melibatkan program asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi pekerja dan program pensiun,” kata Wiyos.

Seminar Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana dan Implementasi Perlindungan Sosial Adaptif di Indonesia terdiri dari lima sesi dengan panelis mulai dari lembaga swadaya masyarakat, peneliti akademik hingga pemerintah. Sesi pertama menjelaskan tentang dasar pemikiran dan *progress* pengembangan Strategi PARB Indonesia. Sesi kedua memperkenalkan inovasi dan inisiatif yang dipelopori dan diterapkan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan ASP. Sesi ketiga menyajikan pembelajaran, praktik terbaik, atau rekomendasi untuk lebih meningkatkan Perlindungan Sosial Adaptif di Indonesia. Sesi empat mengeksplorasi lanskap global pembiayaan perlindungan sosial darurat menuju perlindungan sosial yang sensitif terhadap anak, tanggap gender, dan adaptif. Sesi terakhir memaparkan gambaran dasar pemikiran untuk mengintegrasikan ASP dan DRFI, khususnya dari aspek pembiayaan.

\*\*\*


---

#### Narahubung Media:

Deni Surjantoro  
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi  
Kementerian Keuangan




✉ [mediacenter@kemenkeu.go.id](mailto:mediacenter@kemenkeu.go.id)

 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

 Kemenkeuri

 @kemenkeuRI

 Kemenkeu RI